

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan, maka terdapat kesimpulan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut.

1. Terjadi ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat adalah dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan juga Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019, karena ketiga peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan maka terdapat saran yang diberikan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut.

1. Pemerintah harus melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan yang sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, karena Peraturan daerah tersebut telah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan juga Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus lebih memperhatikan proses perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pertambangan dan harus lebih menindak tegas kepada yang melanggar aturan terkait pertambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryadi, Dwi. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Iman Indra, Siswandi. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- MD, Moh Mahfud. (2003). *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Reksohadiprodjo Sukanto, Indriyo Gitosudarmo. (2008). *Manajemen Produksi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus. (2023). *Kepastian Hukum : Pengantar Teoretis dan Filosofis*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Salim, HS. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwoto. (2010). *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Jawa Tengah: Oase Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sondang, P. Siagian. (2011). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukandarrumidi. (2016). *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sule, Saefullah, Erni Tris Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.

Sumiarni Endang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka.

Terry George R, Leslie W. Rue. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

C. Jurnal :

Andy Tonggo Michael Sihombing, Ricky Banke. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Simantek Volume 7 Nomor 1*, 7.

Berry, Michael Frans. (2018). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Muhammadiyah Law Review Volume 2 Nomor 2*, 89.

Fahris Suritno, Antonius Purwanto, Fonny J. Waani. (2022). Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pola Hidup Petani Kelapa Di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Ilmiah Society Volume 2 Nomor 1*, 3.

Ferra Murati, Saptawartono, Zainudin, Yunitae Kristianie, Rio Rivaldo Tarigan, Rafiq Aldi Saputra, Elisa Alemina Br Ginting, Iqramina Sista Dewi, Gerry Ariatama, Sonia Yuliana Samosir, Muhammad Iqbal. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat. *Jurnal Teknik Pertambangan (JTP)*, 53.

Rahmawati, Debrina. (2018). Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun. *Jurnal Ilmiah Hukum Volume 12 Nomor 2*, 120.

Rokilah. (2020). The Role Of The Regulations In Indonesian State System. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1*, 33.

Sunardi Syahhuri, Budiman. (2021). Efektivitas Pengawasan Perizinan Tambang Batubara Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1*, 34.

Takaendengan, Dormina. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dan Komite Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Volume 6 Nomor 3*, 295.

D. Tesis :

Ahmad Adi Wijaya, 2024, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Banyuasin, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Eren Arif Budiman, 2020, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Tambang Masyarakat Adat Papua Pada Era Otonomi Khusus Papua, Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogi Sefpra Putra, 2022, Kewenangan Pemerintah Dalam Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup, Tesis, Universitas Jambi.

E. Internet :

- Ananda. (2021, Agustus 4). Retrieved from https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOopdeDyLGM3i93taf97Bkfs_8YJD0tGMhy-3x9iiBAAajy6Ue2xp.
- Berita Terkini. (2022, November 23). Retrieved from <https://kumparan.com/berita-terkini/tujuan-sinkronisasi-secara-vertikal-dalam-peraturan-perundang-undangan-1zIwSWCXIVw/full>.
- Berita Update. (2023, November 27). Retrieved from <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-tambang-pertambangan-dan-penambangan-untuk-membedakannya-21exTpiyvWe/full>.
- Dirga, Arga. (2022, Juni 30). Retrieved from <https://konsultantambang.id/tahapan-tahapan-kegiatan-pertambangan-apa-saja/>.
- Eno, Diko. (2024, Oktober 7). Retrieved from <https://www.suarakalbar.co.id/2024/10/aktivitas-tambang-emas-ilegal-di-kalbar-renggut-kerugian-negara-rp1-020-triliun/>.
- Pandu. (2021, September 21). Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.
- PPID Pemprov Kalbar. Retrieved from <https://ppid.kalbarprov.go.id/profil/profil-daerah/>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. (2024, April 11). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>.
- Sabiila, Syahidah Izzata. (2022, Maret 22). Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi/1>.
- Setiawan, Verda Nano. (2025, Januari 16). Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250116115231-4-603633/diam-diam-wna-china-yang-curi-774-kg-emas-ri-dibebaskan>.
- Shela Octavia, Ardito Ramadhan. (2025, Januari 17). Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2025/01/17/16030071/wn-china-pencuri-774-kg-emas-divonis-bebas-jaksa-ajukan-kasasi#google_vignette.

Yurika. (2024, September 24). Retrieved from <https://www.dunia-energi.com/ckb-logistics-genjot-bisnis-sektor-pertambangan-kalimantan-barat/>.

Zakiyuddin, M Haris. (2024, September 27). Retrieved from <https://www.wartatambang.com/read/2024/09/1195/tambang-emas-ilegal-milik-wna-china-di-kalimantan-barat-bikin-negara-rugi-rp-102-triliun/page=1>.

